

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 099706

PENGADILAN NEGERI AMBON

TAHUN ANGGARAN

2019

FEBRUARI

MAHKAMAH AGUNG



REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Urusan Administrasi
Bulan : Februari (Parsial)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA TOTAL	STATUS PELAKSANAAN	
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Status	Keterangan
1	1071.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	104,000,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Belum dimulai	Untuk output layanan sarana dan prasarana internal pada komponen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sejauh ini belum dimulai
2	1066.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	1,689,770,000	148,394,678	8.78 %	1	8.33 %	8.56 %	Pelaksanaan	Untuk output layanan perkantoran pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor bulan Februari 2019 sejauh ini tidak ada permasalahan
3	1066.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	14,312,258,000	862,794,501	6.03 %	1	100.00 %	53.01 %	Pelaksanaan	Untuk output layanan perkantoran pada komponen gaji dan tunjangan bulan Februari 2019 sejauh ini tidak ada permasalahan

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	1071.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	8	Unit	Waktu,	Laporan e-monev Bulan Februari Tahun 2019 untuk Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal pada Komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sejauh ini Belum dimulai
2	1066.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	Tidak Ada Masalah,	
3	1066.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	Tidak Ada Masalah,	Laporan e-monev Bulan Februari Tahun 2019 untuk Output Layanan Perkantoran pada Komponen Gaji dan Tunjangan sejauh ini tidak ada permasalahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI AMBON

PASTI TARIGAN,SH, MH



*Kementerian PPN/
Bappenas*

**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

